

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Jurnal / Karya Ilmiah

- Alamsyah, A. (2017). Proses Enkulturasasi dalam Budaya Entas-entas, Praswala Gara, Dan Pujan Kapat (Sistem Sosial Lokal: Antar Etnis Kabupaten Probolinggo). *Jurnal komunikasi*, 1(1).
- Alo Liliweri. (2011). *Komunikasi serba ada serba makna*. Jakarta: Kencana.
- Alviya, I., Suryandari, E. Y., Maryani, R., & Muttaqin, Z. (2016). Meningkatkan Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Wilayah Hulu Daerah Aliran Sungai Ciliwung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(2), 121-134.
- Amanullah, Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Andersson, K. (2008). *Transparency and accountability in science and politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Andrianto, Nico. (2007). *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arifiani, T. A., & Sjaf, S. (2018). Analisis Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(3), 317-332.
- Arifin, S. (2016). *Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)*. (Master's Thesis, Universitas Airlangga).
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 473-485.
- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2).
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Arumsari, Nugraheni., Septina, Wenny Eka., Luthfi, Muhammad., & Rizki, Nur Kholis Ali. (2017). Komunikasi Politik Kepala Desa dalam Mendorong Inovasi Pembangunan Desa: Studi Kasus Tiga Desa di Lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 86-99.

- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
- Bahfiarti, Tuti., Bakri, & Unde, Alimuddin . (2016). Media Center sebagai Pusat Pelayanan Informasi Publik dalam Penyebarluasan Aktivitas Pemerintahan kepada Masyarakat di Kabupaten Pinrang. *KAREBA: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 189-207.
- Bandiyah, B. (2018, September). Mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dana Desa Sebagai Implementasi PP No 47 Tahun 2015 di Kabupaten Badung dan Tabanan 2017. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* (Vol. 2, No. 1, pp. 1603-1612).
- Beratha, I. N. (1982). *Desa, masyarakat desa dan pembangunan desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Birkinshaw, P. (2006). Freedom of information and openness: Fundamental human rights. *Admin. L. Rev.*, 58, 17
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Democratic governance and sectoral policy reform: tracing linkages and exploring synergies. *World Development*, 28(4), 601-615.
- Brooke, H. (2006). *Your right to know: A citizen's guide to the Freedom of Information Act*. London: Pluto Press.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Calland, R. (2010, October). Review of Impact and Effectiveness of Transparency and Accountability Initiatives, Annex 3: Freedom of Information. In *prepared for the Transparency and Accountability Initiative Workshop, IDS, Brighton*.
- Coglianesi, C. (2009). The transparency president? The Obama administration and open government. *Governance*, 22(4), 529-544.
- Conyers, Diana. And Hills, Peter. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, Suatu Pengantar*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Dahl, R. A. (1985). *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, trj. Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Pers.
- Darch, C., & Underwood, P. (2010). *Freedom of information in the developing world: The citizen, the state and models of openness*. Oxford: Chandos.
- Davis, B, Gordon .1991. Sistem informasi manajemen. Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Dharmawan, Arya Hadi. (2006). *Pembaharuan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan*. Bogor: PSP3-IPB.
- Diansari, R. E. (2015). Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*.
- DJPK. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Dunion, K. (2011). In defence of freedom of information. *Information Polity*, 16(2), 93-96.
- Durianto, Darmadi. et al. (2003). *Invasi Pasar dengan Iklan yang Efektif*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment (IRE).
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ebrahim, A. (2003). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World development*, 31(5), 813-829.
- Etzioni, A. (2010). Is transparency the best disinfectant?. *Journal of Political Philosophy*, 18(4), 389-404.
- Fairbanks, J. (2005). Transparency in the government communication process: the perspective of government communicators.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 135-156.
- Ferdaus, F. (2014). *Implementasi Kebijakan Komunikasi di Indonesia (Studi Kasus atas Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Lampung Tahun 2010-2013)* (Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada).

- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. (Pitman, Boston, MA).
- Gant, J., & Turner-Lee, N. (2011). *Government transparency: Six strategies for more open and participatory government*. Aspen Institute.
- Garcia-Tabuyo, M., Saez-Martin, A., & Caba-Perez, C. (2017). Proactive disclosure of public information: legislative choice worldwide. *Online Information Review*, 41(3), 354-377.
- Gayatri, I.H. (2007). “*Demokrasi Lokal (di Desa): Quo Vadis?*”, Discussion Paper. Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Grimmelikhuijsen, S. G., & Welch, E. W. (2012). Developing and testing a theoretical framework for computer-mediated transparency of local governments. *Public administration review*, 72(4), 562-571.
- Habermas, Jurgen. (1997). “The Public Sphere: An Encyclopedia Article,” dalam Meenakshi Durham & Douglas Kellner (eds). *Media and Cultural Studies*. Massachusetts: Blackwell.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haris, Syamsuddin. (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto, I. (2005). *Apa Itu Kebebasan Memperoleh Informasi*. Jakarta: Koalisi untuk kebebasan Memperoleh Informasi.
- Hazell, R., Worthy, B., & Glover, M. (2010). *The impact of the Freedom of Information Action central government in the UK: Does FOI work?* New York: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1997). *Gelombang Demokrasi Ketiga (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Imawan, Riswandha. (2000). *Pembangunan Politik, Demokratisasi dan integrasi nasional*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar.
- Indraswati, Bestantia. (2017). *Komunikasi dan Keterbukaan Informasi di Badan Publik (Studi pada Implementasi Kebijakan Komunikasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI pada 2010-2015)*. (Master’s Thesis, Universitas Gadjah Mada)

- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Unair*, 3(1), 1-18.
- James, S. (2006). The potential benefits of freedom of information. In R. A. Chapman & M. Hunt (Eds.), *Open government in a theoretical and practical context* (pp. 17–32). Aldershot, U.K.: Ashgate.
- Junaidi, Mahbub & Paribrata, Agni Istighfar. (2015). *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Untuk Pemerintah Desa*. Surabaya: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597-602.
- KDPDPTT. (2018). *Pengelolaan Dana Desa & Penguatan BUMDesa Dalam Perekonomian Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Koessler, F., & Renault, R. (2012). When does a firm disclose product information?. *The RAND Journal of Economics*, 43(4), 630-649.
- Krina P, Loina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (1997). *Identitas politik umat islam*. Bandung: Mizan.
- Kurniawan, L. J., & Puspitosari, H. (2012). *Negara, civil society & demokratisasi: membangun gerakan sosial dan solidaritas sosial dalam merebut perubahan*. Malang: InTrans Publishing.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 2(1), 78-90.
- Kusumanegara, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Leibo, Jefta. (1986). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi.
- López-López, P. C., Puentes-Rivera, I., & Rúas-Araújo, J. (2017). Transparency in public televisions: development of indicators and case analysis of Spain and Chile. *Revista Latina de Comunicación Social*, (72), 253.

- Losee, R. M. (1997). A discipline independent definition of information. *Journal of the American Society for information Science*, 48(3), 254-269.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mansyur, C. (1989). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mariana, Dina. Et al. (2017). *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Penerbit IRE.
- Nur, Marzully & Priantina, Denies. (2012). “Analisis Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility” *Jurnal Nominal*, Vol I, No I, hlm.24.
- McDermott, P. (2008). *Who Needs to Know?-The State of Public Access to Federal Government Information*. Bernan Press.
- Meijer, A., & Thaens, M. (2009). Public information strategies: Making government information available to citizens. *Information Polity*, 14(1, 2), 31-45.
- Meyer, T. (2003). *Demokrasi: sebuah pengantar untuk penerapan*. Jakarta: Kantor Perwakilan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Michener, G., & Worthy, B. (2015). The information-gathering matrix: A framework for conceptualizing the use of freedom of information laws. *Administration & Society*, 47, 1–25.
- Mihradi, R. M. (2011). *Kebebasan informasi publik versus rahasia negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mitchel, Agle Wood. (1997). *Toward A Theory Of Stakeholder Identification And Salience: Defining The Principle Of Who And What Really Counts*.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Cetakan Ke-33)*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustikawati, R. (1999). Pengaruh Locus of Control dan Budaya Paternalistik terhadap Keefektifan Penganggaran Partisipatif dalam Peningkatan Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 96-119
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, 1(1).

- Nasir, Ahkmad., Zakiyah, Wasingatu. & Winarso, Untung Tri. (2013). *Panduan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dan Monitoring Partisipatif*. Yogyakarta: Merapi Recovery Response (MRR) Sub Project, Disaster Risk Reduction Based Rehabilitation and Reconstruction (DR4) Project, UNDP Indonesia.
- Nasution, M. A. (2000). *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian (Cetakan Ke-10)*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Talizuduhu. (1990). *Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, H. (2012). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1-15.
- Nurtjahjo, Hendra. (2006). *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y.S., & Fauzi, S.A.. (2016). *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306-323.
- Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Kajian Tiga Badan Publik: Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 187-195.
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2011). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01).
- Pramusinto, Agus (Editor). 2014. *Seri Kebijakan Publik Indonesia : Demokrasi dan Good Governane*. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik (MAP) UGM.
- Pratikno, P., & Kurniawan, N. I. (2010). Struggle to Gain Representation: Mixed Politics in Democratising Indonesia. *PCD Journal*, 2(1), 119-136.
- Priliantini, Anjang., Kusumajanti., & Purnama, Mega. (2018). Diseminasi Informasi Publik Oleh Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Public Awareness (Studi Kasus Terkait Larangan Penggunaan Pukat Hella dan Pukat Trawl Pada nelayan

di Kepulauan Seribu). *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika Vol. 7 No. 3/November 2018*.

- Purba, S. U. B. (2015). *Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Universitas Medan Area.
- Rahmawati, E. N. (2015). *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)(Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara)*. (Undergraduate Thesis: Universitas Lampung).
- Rahmawati, N.A.. (2016). Kepemimpinan Kepala Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Lingkungan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(4).
- Rahutomo, A. N. (2013). Strategi Humas dalam Mempublikasikan Informasi Pelayanan Publik pada PT. PLN Persero Rayon di Samarinda Hilir. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 324-340.
- Rahz, M. H. (1999). *Menuju masyarakat terbuka: lacak jejak pembaruan sosial di Indonesia*. Jakarta: Ashoka Indonesia berkerjasama dengan Instit.
- Renz, D. O. (2016). *The Jossey-Bass handbook of nonprofit leadership and management*. John Wiley & Sons.
- Retnowati, E. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (Antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54-61.
- Ridjal, Fauzie & Karim. (1991). *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Rozaki, Abdur & Yulianto, Sg. (2015). *Buku Saku Pelembagaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Sadikin, Ali. (1995). *Tantangan demokrasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sadu, W., & Irwan, T. (2007). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sajogyo & Sajogyo, P. (2007). *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan Jilid 2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Salle, A. (2016). Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 1(1).
- Sari, E. (2003). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Demokrasi*, 2(1).

- Sastropoetro, Santoso. (1988). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: PT Alumni.
- Schauer, F. (2011). Transparency in three dimensions. *U. Ill. L. Rev.*, 1339.
- Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomás, M., & Portillo-Tarragona, P. (2009). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. *Environment and planning C: Government and Policy*, 27(2), 355-378.
- Setiawati, D., & Sanjoyo, W. Y. (2012). Perubahan Sosial Budaya Desa Purwodadi Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 1990-2010. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 2(1).
- Setyanto, Y., & Winduwati, S. (2018). Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata Berwawasan Lingkungan dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan (Studi pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 164-175.
- Siagian, H. (1989). *Pokok-pokok pembangunan masyarakat desa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sirajudin, D. S. (2005). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press.
- Snell, R. D., & Sebina, P. (2007). Information Flows: The real art of Information Management and Freedom of Information. *Archives and Manuscripts: The Journal of the Australian Society of Archivists*, 35(1), 54-82.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju masyarakat partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).
- Stefanick, L. (2011). *Controlling knowledge: Freedom of information and privacy protection in a networked world*. Athabasca University Press.
- Stein, Laura L. & Camaj, Lindita (2018). Freedom of Information. *Oxford Research Encyclopedia of Communication: Media and Communication Policy*
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan*

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008) (Master's Thesis, Universitas Diponegoro).

- Sugianti, S. (2017). *Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2013-2015* (Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Sugihen, B. T. (1996). *Sosiologi Pedesaan:(suatu pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan Ke-16)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulaiman, A. I., Lubis, D. P., Susanto, D., & Purnaningsih, N. (2016). Merancang Media Informasi Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kawistara*, 6(1), 93-106.
- Sumarno, AP. (1990). *Pendapat Umum Dalam Sistem Politik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumarto, S. S. (2003). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sunarjo, Djunasih. (1984). *Opini Publik*. Yogyakarta : Liberty.
- Suparjan & Suyatno, H. (2003). *Pengembangan Masyarakat: Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suroso, Hadi., Hakim, Abdul & Noor, Irwan. & (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(1), 7-15.
- Susanto, E. H. (2015). Undang-undang keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan. *Komunikator*, 5(03).
- Susilowati, N. (2014). *PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI DI DAERAH (Studi Deskriptif mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri Selama Tahun 2008-2013)* (Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Sutoro, Eko. Et al. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.

- Taufik, T. (2009). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal ekonomi*, 17(01).
- Tumbel, Satria Mentari. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 6(1).
- Utomo, S. J. (2015). Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.
- Van Biezen, I. (2004). Political parties as public utilities. *Party politics*, 10(6), 701-722.
- Wahyudi, Sarjana Sigit. (2009). *Demokrasi di Tingkat Lokal. Kegiatan Diskusi Sejarah "Wajah Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: 30-31 Maret 2009.
- Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers' perceptions. *Public Administration Review*, 67(2), 265-278.
- Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). *Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wibowo, G. A. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(3), 313-325.
- Wijaya, A. J. (ed). (2000). *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan YAPIKA dan Forum LSM DIY.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Wowor, S. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (suatu Studi di Desa Raanan Baru Satu Kecamatan Motoling Barat) 1. *JURNAL POLITICO*, 2(6).
- Yuliati, Y., & Purnomo, M. (2003). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Yuliatun, A. (2016). *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Polres Bantul* (Master's Thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107-144.

Zulkarnain, Sirajuddin, & Widiarto A.E.. (2006). *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik Upaya kolektif Berantas Korupsi* . Malang: In Trans Publishing.

Situs:

<http://www.berdesa.com/900-kasus-penyalahgunaan-dana-desa-masuk-bpk/>
diakses pada 01 Oktober 2018

<https://www.antaranews.com/berita/660603/presiden-apresiasi-tulungagung-terbaik-manfaatkan-dana-desa> diakses pada tanggal 03 Oktober 2018

<http://kip.jatimprov.go.id/news/read/2017/12/18/186/ppid-award-2017-dorong-keterbukaan-informasi-hingga-ke-desa.html> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018

<http://nyawangan.tulungagungdaring.id/anggaran> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<http://geger.tulungagungdaring.id/anggaran> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<http://wonorejo.tulungagungdaring.id/anggaran> diakses pada tanggal 12 Februari 2019

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-pendapatan-desa> diakses pada tanggal 01 Agustus 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten Tulungagung. (2017). *Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017*. Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 2. Tulungagung: Sekretaris Daerah.

Kabupaten Tulungagung. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa*. Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E. Tulungagung: Sekretaris Daerah.

Kabupaten Tulungagung. (2017). *Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018*. Berita

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 63. Tulungagung: Sekretaris Daerah.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.